



Analisis Otonomi Daerah dan Disparitas Regional antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Vebrina Hania Cholily

Universitas Diponegoro, Indonesia.

*Email: vebrinahania@students.undip.ac.id

*Correspondence: *Vebrina Hania Cholily*

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1203

ABSTRAK

Dampak penerapan konsep desentralisasi fiskal pada pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis disparitas regional atau ketimpangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, kuadran analisis tipologi wilayah dan indeks williamson. Hasil penelitian menunjukkan V_w (Indeks Williamson) Kabupaten Kebumen mendekati angka 1 yang artinya ketimpangan semakin lebar dan Kabupaten Semarang menunjukkan V_w (Indeks Williamson) mendekati angka 0 yang artinya ketimpangan yang semakin kecil di Kabupaten Semarang. Pada Kabupaten Kebumen maupun Kabupaten Semarang, baik kemiskinan, PAD, dan pengangguran memiliki nilai p -value lebih besar dari 0,05 dimana H_1 ditolak / variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap disparitas. Pada Kabupaten Kebumen, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas. Tingkat kriminalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Pada Kabupaten Semarang, baik secara parsial maupun simultan, kriminalitas dan rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional.

Kata Kunci: Ketimpangan; Indeks Williamson; Tipologi Wilayah; Regional
JEL Classification: O18, P25, R11

ABSTRACT

The impact of implementing the concept of fiscal decentralization in the implementation of regional autonomy on regional development inequality. The aim of this research is to analyze regional disparities or regional inequality that occur in Semarang Regency and Kebumen Regency. This research uses multiple regression analysis, quadrant regional typology analysis and the Williamson index. The results of the research show that V_w in Kebumen Regency is approaching the number 1, which means inequality is getting wider and Semarang Regency shows V_w is approaching 0, which means inequality is getting smaller in Semarang Regency. In Kebumen Regency and Semarang Regency, both poverty, PAD and unemployment have a p -value greater than 0.05 where H_1 is rejected / these variables have no partial significant effect on disparities. In Kebumen Regency, the average length of schooling has a significant positive effect on disparities. The crime rate does not have a significant effect on regional disparities. In Semarang Regency, both partially and simultaneously, crime and average years of schooling have a significant effect on regional disparities.

Keywords: Inequality; Williamson Index; Regional Typology; Regional JEL Classification: O18, P25, R11

PENDAHULUAN

Peran otonomi daerah sebagai katalisator pemerataan. Dampak penerapan konsep desentralisasi fiskal pada pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah. Di Indonesia ketimpangan atau disparitas antar wilayah menjadi salah satu tantangan pembangunan paling penting (Sanditia et al., 2019). Disparitas disebabkan oleh PDRB perkapita provinsi atau daerah kabupaten yang tidak merata tiap tahunnya, akibatnya kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda (Sugito, 2015). Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi (Aidar & Syahputra, 2015). Strategi yang dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi ketimpangan antar daerah atau wilayah dengan cara investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan diluar Pulau Jawa (Khairunnisa & Hidayat, 2015).

Serta upaya untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan signifikan dan terdistribusi lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam (Mauliddiyah, 2014). Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan (disparitas) pembangunan antar daerah adalah (1) Perbedaan karakteristik limpahan sumber daya, (2) Perbedaan demografi, (3) Perbedaan kemampuan sumber daya manusia, (4) Perbedaan potensi lokasi, (5) Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan (6) Perbedaan dari aspek potensi pasar (Ratriadi, 2009).

Ukuran ketimpangan antar wilayah, dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu, pertama, ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar dipelopori oleh Williamson 1996 yang dikenal dengan Williamson Jurnal Ekonomi/ Volume XVIII, No. 01, Moret 2013: 97-108 Index (Ambar et al., 2021). Kedua, Theil Index. Data yang digunakan untuk ini sama dengan Williamson Index yaitu Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Penafsiran kedua index tersebut juga sama yaitu mendekati 0 berarti semakin sangat merata dan mendekati 1 (satu) semakin sangat timpang (Syita, 2016).

Theil Index sebagai ukuran ketimpangan memiliki beberapa yaitu, pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas (Damayanti, 2019). Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Ketiga, Indeks Gini untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah atau ketimpangan PDRB antar wilayah yang diukur dengan indeks gini dengan nilai antara 0 (setiap orang atau wilayah memiliki pendapatan yang sama) dan 1 (satu orang/wilayah memiliki seluruh pendapatan) (Gama, 2009).

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Sedangkan yang lain pendapatnya nol) dan berapa kue nasional yang dinikmati 40% golongan pendapatan terendah (Pudjianto & Syawie, 2015). Keempat, Bank Dunia (World Bank) mengelompokan distribusi pendapatan menjadi 3 kategori yaitu (1) Jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah, (2) Jumlah proporsi yang yang diterima 40% penduduk lapisan sedang, dan (3) Jumlah proporsi yang diterima 20% penduduk lapisan tinggi. Kemudian dipilih dua kabupaten yang akan digunakan sebagai wilayah perbandingan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan atau disparitas yang terjadi antar dua wilayah tersebut (Soares et al., 2017). Dua wilayah yang digunakan tepatnya adalah antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah (Sanjaya et al., 2018).

Alasan memilih Kabupaten Semarang adalah karena tingkat atau presentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang adalah peringkat no 3 paling rendah diantara 34 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu sebesar 7,04% yang mana peringkat pertama dan kedua adalah Kabupaten Jepara dan diikuti dengan Kabupaten Kudus (Fatmawati & Azizah, 2022). Dengan kata lain Kabupaten Semarang menduduki peringkat ketiga sebagai Kabupaten yang jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut dalam kategori yang rendah. Sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang maju dalam berbagai bidang serta dapat dijadikan wilayah pembanding dalam ketimpangan regional sebagai wilayah yang maju.

Sedangkan alasan peneliti memilih Kabupaten Kebumen adalah dikarenakan tingkat atau presentase kemiskinan di Kabupaten Kebumen merupakan kebalikan dari Kabupaten Semarang. Kabupaten Kebumen menduduki peringkat teratas presentase penduduk miskin di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu sebesar 16,82% (Wicaksono & BASUKI, 2010). Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak diantara 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Sweden, n.d.). Sehingga Kabupaten Kebumen dapat dijadikan sebagai wilayah pembanding dalam ketimpangan regional sebagai wilayah yang kurang maju atau tertinggal.

Menggunakan tingkat kemiskinan karena kemiskinan merupakan salah satu faktor yang utama dalam melakukan pengukuran terhadap terjadinya ketimpangan atau disparitas antar wilayah, dengan melihat tingkat kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat menunjukkan wilayah tersebut masuk kedalam kategori maju atau tertinggal/berkembang yang mana jika tingkat kemiskinan wilayah tinggi maka mayoritas atau kebanyakan penduduk yang tinggal dalam wilayah tersebut cenderung kurang mampu dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Muttaqim, 2014). Sehingga pembangunan wilayah dalam berbagai bidang juga akan terhambat jika kualitas penduduk juga rendah.

Hal ini berbanding terbalik jika tingkat kemiskinan suatu wilayah rendah karena menunjukkan mayoritas penduduk yang berada dalam wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan baik sehingga cenderung pembangunan dalam wilayah tersebut juga akan lebih berkembang dengan pesat karena kualitas SDM yang dimiliki tinggi. Karena semakin berkembangnya ketimpangan antar wilayah dalam berbagai bidang. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis adanya disparitas regional atau ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Jawa tepatnya antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kebumen.

Penelitian mengenai disparitas telah dilakukan di kota Kedungsepur oleh Sanditia et al (2019) dari hasil analisis Indeks Williamson dapat diperoleh bahwa disparitas pendapatan perkapita antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur selama tahun 2010-2017 mendekati 1 yaitu dengan rata-rata

sebesar 0,8368. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan perkapita yang tinggi antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur. Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai disparitas di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen tahun 2014-2018. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan fokus pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah. Dengan memilih dua wilayah ini, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman disparitas regional di tingkat yang lebih lokal, yang dapat memiliki implikasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dengan menggunakan Indeks Williamson sebagai salah satu metode utama untuk mengukur disparitas ekonomi. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perbedaan dalam anggaran daerah dan kesenjangan ekonomi di dua kabupaten tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menganalisis disparitas regional atau ketimpangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen. Fokus utama adalah pada perhitungan dan interpretasi Indeks Williamson yang mencerminkan perbedaan dalam anggaran daerah dan kesenjangan ekonomi, mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal, dengan melihat dampaknya pada ketimpangan ekonomi antar wilayah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana penerapan konsep desentralisasi fiskal dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi di tingkat daerah, untuk menganalisis pengaruh variabel terkait seperti kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengangguran, lama sekolah, dan tingkat kriminalitas terhadap disparitas regional di kedua kabupaten dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang berdasarkan temuan penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah, khususnya antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang. Hasil analisis dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi disparitas tersebut. Temuan penelitian dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembangunan berkelanjutan di kedua kabupaten. Upaya untuk mendorong keseimbangan infrastruktur, alokasi sumber daya, modal, dan teknologi diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk time series dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dengan sample daerah berupa Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan metode analisis deskriptif. Besarnya disparitas regional di hitung menggunakan Williamson Index (Indeks Ketimpangan Regional). Keterangan: w_i = Indeks williamson, Y_i = Pendapatan perkapita di wilayah ke- i , Y = Pendapatan perkapita rata-rata seluruh daerah, F_i = Populasi di wilayah ke- i dan N = Populasi total. Ukuran Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati 0 maka kesenjangan semakin kecil, sedangkan mendekati 1 kesenjangan semakin besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Disparitas Regional Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang**

Besarnya disparitas regional (Mw) dan kesenjangan ekonomi (vw) dengan Williamson Index (Indeks Ketimpangan Regional) Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018.

Tabel 1.**Disparitas Regional Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018**

Tahun	Kabupaten Kebumen		Kabupaten Semarang	
	Mw	vw	Mw	vw
2014	3,45284683	0,00222163	2,84105649	0,0018263
2015	3,4381729	0,00213986	2,85779735	0,00178583
2016	3,4242901	0,00208691	2,87490151	0,00174807
2017	3,41023542	0,00203239	2,89188238	0,00172472
2018	3,39582637	0,00197175	2,9085853	0,00170477

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah maka dapat menggunakan Indeks Williamson yang mana besarnya Indeks Williamson antara 0-1. Bila Indeks Williamson $< 0,3$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah rendah. Bila Indeks Williamson $0,3 - 0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang. Bila Indeks Williamson $> 0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi. Dari tabel diatas ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang sama-sama berada pada kategori ketimpangan ekonomi wilayah rendah. Indeks Williamson yang dihasilkan dalam 5 tahun (tahun 2014-tahun 2018) besarnya $< 0,3$ sehingga baik Kabupaten Kebumen ataupun Kabupaten Semarang berada dalam ketimpangan ekonomi wilayah rendah.

Meskipun sama-sama berada dalam kategori ketimpangan wilayah rendah, Kabupaten Semarang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen. Hal tersebut dapat dilihat dari table perhitungan di atas. Kabupaten Kebumen tingkat ketimpangan ekonomi berkisar di angka 0,002 sedangkan Kabupaten Semarang tingkat ketimpangan ekonomi berkisar di bawah 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Semarang.

Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang**Tabel 1. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2014**

PDRB Perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$
Laju Pertumbuhan (r)			$15.163.091,84 < 764.959.150,95$

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

$R_i > r$ 5,79 > 5,27	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
$R_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal

Tabel 2. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015

PDRB Perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$ 16.115.554,01 < 806.765.092,17
Laju Pertumbuhan (r)			
$R_i > r$ 6,28 > 5,47	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat	
$R_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal	

Tabel 3. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2016

PDRB perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$ 16.923.719,54 < 849.099.354,69
Laju Pertumbuhan (r)			
$R_i > r$	Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat	
$R_i < r$ 5,01 < 5,25	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal	

Tabel 4. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017

PDRB Perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$ 17.794.789,30 < 893.750.296,17
Laju Pertumbuhan (r)			
$R_i > r$	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat	
$R_i < r$ 5,15 < 5,26	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal	

Tabel 5. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2018

PDRB Perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$ 18.777.048,50 < 941.164.118,75
Laju Pertumbuhan (r)			
$R_i > r$ 5,52 > 5,31	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat	
$R_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal	

Tabel 6. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2014

PDRB perkapita (y)		$Y_i > y$	$Y_i < y$ 27.264.112,96 < 764.959.150,95
Laju Pertumbuhan (r)			
$R_i > r$ 5,85 > 5,27	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat	
$R_i < r$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal	

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Tabel 7. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2015

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB perkapita (y)	
	Yi > y	Yi < y
		28.768.327,30 < 806.765.092,17
Ri > r 5,52 > 5,47	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
Ri < r	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal

Tabel 8. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2016

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB Perkapita (y)	
	Yi > y	Yi < y
		30.292.468,04 < 849.099.354,69
Ri > r 5,30 > 5,25	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
Ri < r	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal

Tabel 9. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2017

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB perkapita (y)	
	Yi > y	Yi < y
		32.002.984,99 < 893.750.296,17
Ri > r 5,65 > 5,26	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
Ri < r	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal

Tabel 10. Kuadran Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten Semarang pada Tahun 2018

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB Perkapita (y)	
	Yi > y	Yi < y
		33.855.679,34 < 941.164.118,75
Ri > r 5,79 > 5,31	Daerah maju dan Tumbuh cepat	Daerah berkembang cepat
Ri < r	Daerah maju tapi tertekan	Daerah relative tertinggal

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi perbedaan antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang. Dalam periode 2014-2018 Kabupaten Kebumen mengalami 2 jenis tipologi kelas pendekatan sektoral/daerah yakni pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Kebumen berada di kelas daerah berkembang cepat, namun di tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Kebumen berada di kelas daerah relative tertinggal, dan pada tahun 2018 Kabupaten Kebumen kembali berada di kelas daerah berkembang cepat.

Sedangkan dalam periode 2014-2018 Kabupaten Semarang hanya mengalami 1 jenis tipologi kelas pendekatan sektoral/daerah yakni berada di kelas daerah berkembang cepat. Sehingga dari tabel perbedaan kelas antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Semarang terlihat bahwa Kabupaten Semarang lebih maju dibandingkan Kabupaten Kebumen.

Analisis Regresi Berganda Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas**a. Kabupaten Kebumen****Bidang Ekonomi****Tabel 11. Bidang Ekonomi Kebumen**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.258618	0.061743	52.77717	0.0121
Kemiskinan	0.011545	0.002679	4.310001	0.1451
PAD	-6.36E-08	4.94E-08	-1.286856	0.4206
Pengangguran	-1.43E-06	7.82E-07	-1.824170	0.3192
R-squared	0.983782	Mean dependent var		3.424274
Adjusted R-squared	0.935127	S.D. dependent var		0.022450
S.E. of regression	0.005718	Akaike info criterion		-7.499847
Sum squared resid	3.27E-05	Schwarz criterion		-7.812297
Log likelihood	22.74962	Hannan-Quinn criter.		-8.338431
F-statistic	20.21957	Durbin-Watson stat		3.139037
Prob(F-statistic)	0.161709			

Untuk menunjukkan apakah model regresi valid sebagai model prediktor maka dapat dilihat dengan besaran nilai standar error model yang kemudian dibandingkan dengan nilai standar deviasi variabel response. Apabila nilai standar eror lebih kecil dibanding nilai standar deviasi variabel response, maka model regresi dapat dikatakan valid sebagai model prediktor. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai standar eror lebih kecil dari nilai standar deviasi variabel response yakni $0.005718 < 0.022450$, maka model regresi dapat dikatakan valid sebagai model prediktor.

Berdasarkan hasil regresi tabel diatas, baik secara parsial maupun simultan variabel kemiskinan, PAD, dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial maka dapat dilihat dari nilai p value. Baik kemiskinan, PAD, dan pengangguran memiliki nilai p value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H1 ditolak atau variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap disparitas. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan maka dapat dilihat dari nilai p value (F-Statistic) yakni sebesar 0.161709, lebih dari 0,05 maka H1 ditolak / variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap disparitas.

Bidang Sosial**Tabel 12. Bidang Sosial Kabupaten Kebumen**

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.777407	0.124857	22.24462	0.0020
Rata Lama Sekolah	0.093289	0.017886	5.215603	0.0349
Kriminalitas	-4.76E-05	8.08E-05	-0.589446	0.6153

R-squared	0.931820	Mean dependent var	3.424274
Adjusted R-squared	0.863640	S.D. dependent var	0.022450
S.E. of regression	0.008290	Akaike info criterion	-6.463836
Sum squared resid	0.000137	Schwarz criterion	-6.698174
Log likelihood	19.15959	Hannan-Quinn criter.	-7.092774
F-statistic	13.66705	Durbin-Watson stat	3.263672
Prob(F-statistic)	0.068180		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai standar eror lebih kecil dari nilai standar deviasi variabel response yakni $0.008290 < 0.022450$, model regresi dapat dikatakan valid sebagai model prediktor. Berdasarkan hasil regresi tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas dengan ditunjukkan pada nilai probailitas yakni sebesar 0,0349. Sedangkan tingkat kriminalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan maka dapat dilihat dari nilai p value (F-Statistic) yakni sebesar 0.1068180 dimana lebih dari 0,05 maka H1 ditolak atau variabel variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap disparitas.

b. Kabupaten Semarang Bidang Ekonomi

Tabel 13. Bidang Ekonomi Kabupaten Semarang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.178380	0.144970	21.92440	0.0290
Kemiskinan	-0.043804	0.015390	-2.846308	0.2151
PAD	1.53E-07	8.25E-08	1.850841	0.3154
Pengangguran	-7.72E-07	4.56E-07	-1.693014	0.3397

R-squared	0.983574	Mean dependent var	2.874845
Adjusted R-squared	0.934298	S.D. dependent var	0.026744
S.E. of regression	0.006855	Akaike info criterion	-7.137071
Sum squared resid	4.70E-05	Schwarz criterion	-7.449521
Log likelihood	21.84268	Hannan-Quinn criter.	-7.975655
F-statistic	19.96022	Durbin-Watson stat	2.928473
Prob(F-statistic)	0.162734		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai standar eror lebih kecil dari nilai standar deviasi variabel response yakni $0.006855 < 0.026744$, maka model regresi dapat dikatakan valid sebagai model prediktor. Berdasarkan hasil regresi tabel diatas menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel kemiskinan, PAD, dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial maka dapat dilihat dari nilai p-value.

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Baik kemiskinan, PAD, dan pengangguran memiliki nilai p value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H1 ditolak atau variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap disparitas. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan maka dapat dilihat dari nilai p value (F-Statistic) yakni sebesar 0.162734 dimana lebih dari 0,05 maka H1 ditolak atau variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap disparitas.

Bidang Sosial

Tabel 12. Bidang Sosial Kabupaten Semarang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.003473	0.000818	-4.244249	0.0513
Kriminalitas	8.96E-07	1.80E-07	4.975494	0.0381
Rata Lama Sekolah	0.000412	9.76E-05	4.216868	0.0519
R-squared	0.945929	Mean dependent var		4.50E-05
Adjusted R-squared	0.891858	S.D. dependent var		3.43E-05
S.E. of regression	1.13E-05	Akaike info criterion		-19.66464
Sum squared resid	2.54E-10	Schwarz criterion		-19.89898
Log likelihood	52.16161	Hannan-Quinn criter.		-20.29358
F-statistic	17.49422	Durbin-Watson stat		1.831289
Prob(F-statistic)	0.054071			

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa nilai standar eror lebih kecil dari nilai standar deviasi variabel response yakni $1.13E-05 < 03.43E-05$, maka model regresi dapat dikatakan valid sebagai model prediktor. Berdasarkan hasil regresi tabel diatas menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel kriminalitas dan rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial maka dapat dilihat dari nilai p value.

Baik kriminalitas dan rata lama sekolah memiliki nilai p value sama dengan 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima berpengaruh signifikan secara parsial terhadap disparitas. Untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan maka dapat dilihat dari nilai p value (F-Statistic) yakni sebesar 0.054071 dimana sama dengan 0,05 maka H1 diterima atau variabel variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap disparitas.

SIMPULAN

Dari hasil analisa, Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson dijelaskan Bahwa Kabupaten Kebumen memiliki pola penurunan indeks Williamson untuk PDRB per kapita menunjukkan anggaran daerah yang semakin besar disertai kesenjangan ekonomi yang semakin besar pula. Kabupaten Semarang memiliki pola penurunan indeks Williamson untuk PDRB per kapita menunjukkan anggaran daerah yang semakin besar disertai kesenjangan ekonomi yang semakin kecil pula.

Hal ini menunjukkan telah terjadi pemerataan di Kabupaten Semarang. Dari hasil analisa perhitungan Indeks Williamson, menunjukkan Vw Kabuapten Kebumen mendekati angka 1 (satu) dari tahun 2014-2018 yaitu 0.0022163, 0.00213986, 0.00208691, 0.00203239, 0.00197175 yang artinya ketimpangan semakin lebar dan Kabupaten Semarang menunjukkan Vw mendekati angka 0 (nol) dari tahun 2014-2018 yaitu 0.0018263, 0.00178583, 0.00174807, 0.00172472, 0.00170477 yang artinya ketimpangan yang semakin kecil di Kabuapten Semarang.

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

Pada Kabupaten Kebumen maupun Kabupaten Semarang, baik variabel kemiskinan, PAD, dan pengangguran memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H1 ditolak atau variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap disparitas. Pada Kabupaten Kebumen, rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap disparitas dengan ditunjukkan pada nilai probabilitas yakni sebesar 0,0349. Tingkat kriminalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional. Pada Kabupaten Semarang, baik secara parsial maupun simultan variabel kriminalitas dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap disparitas regional.

Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya memperbaiki kinerja dan memberikan perhatian lebih pada pemerataan ekonomi tiap kecamatan didaerahnya agar terjadi keseimbangan infrastruktur, alokasi sumber daya, modal, dan teknologi. Sehingga pembangunan ekonomi terjadi secara merata dan menghasilkan PDRB daerah yang merata juga. Perlu adanya program memadai untuk menjalankan prioritas pembangunan di Kabupaten Kebumen agar dapat mengurangi ketimpangan yang melebar.

Misalnya melalui program kesehatan, Pendidikan, dan budaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti pelatihan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten perlu mengajak masyarakat untuk sadar dan berpartisipasi dalam menggali potensi yang ada pada tiap tiap kecamatan mereka. Seperti potensi wisata, potensi UMKM yang ada pada daerah masing masing agar dapat ditingkatkan kualitasnya.

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, N., & Syahputra, R. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(1), 56–68.
- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Damayanti, M. A. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fatmawati, A., & Azizah, S. N. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perceived Organizational Support Terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening: Studi pada PNS di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(2), 154–180.
- Gama, A. S. (2009). Disparitas dan konvergensi produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT*, 2(1), 38–48.
- Khairunnisa, A., & Hidayat, P. (2015). *Analisis disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan*. University of North Sumatra.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Mauliddiyah, A. (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6(2).
- Muttaqim, H. (2014). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Aceh Dengan Pendekatan Indeks Ketimpangan Williamson Periode Tahun 2008-2011. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 14, 145554.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan pembangunan manusia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(3).
- Ratriadi, B. (2009). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang*.
- Sanditia, E. M., Juliprijanto, W., & Rusmijati, R. (2019). Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita dengan Pendekatan Sektoral Antar Wilayah Kedungsepur Tahun 2010-2017. *Dinamic*, 1(2), 168–181.
- Sanjaya, A., Hastuti, D., & Awami, S. N. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap konsumsi cabai rawit di Kabupaten Semarang. *Mediagro*, 13(1).
- Soares, L., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2017). Analisis disparitas dan interaksi spasial di Timor-Leste. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 1(1), 74–86.
-

Vebrina Hania Cholily

Analysis of Regional Autonomy and Regional Disparity Between Semarang Regency and Kebumen Regency in 2014-2018

SUGITO, S. (2015). *Analisis Disparitas Pembangunan Daerah Ditiga Kota Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang) Tahun 1993-2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1–12.

Sweden, N. I. V. L. U. (n.d.). Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2019. Jawa Tengah dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. 2019. Kabupaten Magelang dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Magelang. *Policy*, 4(1), 7–18.

Syita, S. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Propinsi DI Yogyakarta Periode Tahun 2008–2014*.

Wicaksono, C. P., & BASUKI, M. U. (2010). *Analisis disparitas pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2007*. Universitas Diponegoro.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).